

## *Refleksi dan Pemikiran terkait Homoseksualitas, Perkawinan Sejenis dan Kekristenan<sup>1</sup>*

Bagi saya tak ada komentar soal pelegalan *same-sex marriage* oleh Supreme Court Amerika Serikat, yang lebih lucu dan nyentrik dari celoteh Pakalu Papito: ‘*Who needs 50 shades of grey when there’s 50 states of gay*’. Komentar itu sarkastik, namun mayoritas rekan yang pro *same-sex marriage* justru tidak tersinggung, malah ikut tertawa membacanya. Komentar itu adalah bentuk estetika-paradoks, jauh lebih menarik ketimbang narasi monolog dan dialog-mentok di lini masa terkait tema ini. Secara khusus waktu saya melihat postingan teman-teman yang mengaku menganut keyakinan Kristiani.

Sebenarnya tidak ada yang terlalu istimewa atas pelegalan oleh badan dan penafsir hukum tertinggi di Amerika Serikat tersebut. Perkawinan sejenis telah dilegalkan di dua puluh negara, sebagai wujud tafsiran atas Hak Membentuk Keluarga, yang merupakan bagian dari HAM. Belanda di tahun 2001 sudah memulai menerapkan kebijakan pelegalan pernikahan sejenis, diikuti sejumlah negara Eropa dan Amerika Selatan, juga Selandia Baru. Jadi itu sudah sangat lama sebelum Konstitusi Paman Sam memutuskan hal yang sama untuk keseluruhan negara bagiannya. Di negeri Patung Liberti itu sendiri, sebelum putusan *Obergefell v. Hodges*, Jumat 26 Juli 2015, pelegalan perkawinan sejenis sudah diterapkan di 37 negara bagian, mulai dari negara bagian Massachusetts pada 2004. Jadi tentu saja agak konyol jika warga di Indonesia seperti baru turun gunung dalam menanggapi berita tersebut.

Amerika Serikat mungkin dianggap pusat-jagad. Jadi segala hal yang terjadi disana dikhawatirkan berimbas ke sejumlah tempat lain, termasuk standar dan nilai hidup, termasuk sikap toleran terhadap pernikahan sejenis. Tapi marilah memijak di Indonesia. Kita masih tinggal di negara dimana perkawinan beda agama itu sulit, tapi kesempatan untuk jadi pedofilia bisa difasilitasi oleh pernikahan sah. Jangankan sejenis kelamin dan beda agama, sebagian suku bahkan masih sangat chauvinistik untuk menggelontorkan pernikahan tertutup sesama kaumnya. Kita toh masih berhadapan dengan sejumlah stigma negatif terhadap perilaku intersex dan transgender, meski sudah menyaksikan beberapa orang berhasil diakui pergantian kelaminnya. Kita juga masih berkutat dengan ratusan kasus HAM lain, yang seringkali lekat dengan keberpihakan *cemen* pada kelompok mayoritas, kaum berduit atau penguasa.

Jadi adalah *fobia-frenzy* jika mengira bahwa dalam waktu dekat Mahkamah Konstitusi atau Pemerintah kita bakal membolehkan pernikahan sejenis, atau seketika akan melimpah jumlah penganut dan pengamal sikap pro-LGBTIQ di negeri ini. Tidak itu masih terlalu jauh. Setidaknya bagi Inang Sidabutar di

---

<sup>1</sup> Sedari awal tradisi bahasa baku kita, kata ‘perkawinan’ sangat layak dipakai dalam konotasi ‘marriage’. Tapi belakangan karena mungkin memandang ke-Arab-an lebih mentereng dalam hal norma, kita lebih suka memakai term ‘pernikahan’ (meski ‘nokkah’ dalam konteks etimologisnya justru melulu berarti ‘senggama’) dan melakukan tindakan peyorasi pada makna ‘perkawinan’. *Aniway*, dalam undang-undang kita istilah yang dipakai masih: “perkawinan”. Tapi demi menjunjung tinggi teori perkembangan dinamis-bahasa, dan demi memuaskan hasrat *Arabfilia* yang tanpa sadar merasuk sejumlah kita saya akan bergantian memakai istilah ‘perkawinan’ dan ‘pernikahan’ dengan konotasi yang sama positifnya. Meski saya gak akan mengganti Jumat menjadi *Juma’ah*, atau sebutan ‘putra-putri/laki-perempuan’ jadi ‘*ikhwan-akhwat*’ dan sapaan ‘ayah-ibu’ dengan ‘*abi-ummi*’. ☺

Garoga, atau Pace Enols di Keerom, bahkan Mbak Jumini di Tebet, wacana itu mungkin masih seperti wacana kue *ongol-ongol* di mata orang yang tinggal di Siberia.

Tapi berhubung kaum kelas menengah *ngehe* sering mengira perspektifnya adalah penentu kebijakan negara, maka penting juga untuk membalas beberapa pertanyaan yang bernada risau. Soal sikap terhadap perkawinan sejenis, homoseksualitas dan isu gender yang lebih luas terkait LGBTIQ. Apalagi kalau perdebatan selalu membawa wacana agama, sikap negara, hukum dan HAM. Hal-hal yang tentu menjadi fondasi penting dalam kita bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Tentu agak *suang* kalau ada pejuang toleransi umat beragama, akhirnya seperti menjilat ludah sendiri menarik dukungan yang total terhadap perjuangan HAM, karena alasan HAM juga dipakai kaum LGBTIQ untuk memperjuangkan pengakuan atas haknya. Agak aneh pula jika kaum pro-LGBTIQ melakukan pencelaan habis-habisan terhadap kaum beragama hingga membuang atau menolak mengakui dimensi emansipatoris dan esoteris dari agama, yang harusnya bisa jadi pijakan diskusi. Yang lebih konyol lagi adalah kalau argumentasi yang diangkat adalah ayat-ayat suci yang direduksi dan direndahkan maknanya, atau malah pseudo-sains yang dipaksakan. Argumen yang dalam bahasa saya bukanlah '*argumentasi*', lebih cocok jika huruf 's'-nya dibuang dan diantara huruf 'n' dan 't' diberi spasi.

Karena saya dianggap berkecimpung dalam perjuangan HAM, khususnya isu toleransi dan keberagaman agama, juga karena pernah terlibat (entah jadi aktivis atau pasivis) di kumpulan kecil mahasiswa Kristen, yayasan yang mendukung literasi Alkitab, situs media umum yang digagas umat Kristen, juga karena sejumlah embel-embel lain maka ada sejumlah pertanyaan terkait isu pernikahan sejenis ini yang juga dialamatkan kepada saya. Seringkali pertanyaannya selalu bernuansa biner: "*Setuju atau tidak dengan pernikahan sejenis? Setuju atau tidak dengan kaum homoseksual? Mau atau tidak ganti PP dengan nuansa pelangi? Kekristenan sekarang mendukung LGBTIQ atau menentangnya?*". Pertanyaan seperti itu sering kali menjebak dan tak cukup dijawab 'ya' dan 'tidak'. Yesus tidak pernah menjawab pertanyaan biner seperti itu dengan jawaban yang di satu sisi saja. Selalu dengan mengajak berpikir, sering pula dengan memunculkan pertanyaan pencerah.

Berhubung saya masih sangat jauh dari menyerupai Kristus, maka saya belum seberkapasitas itu dalam memberi pencerahan. *Dus*, saya memutuskan untuk berpanjang lebar. Mungkin menghabiskan beberapa halaman untuk mencoba mendudukan persoalan dan menggerayangnya ☺. Tapi sengaja tidak memilih gaya yang terlalu ilmiah, demi mengajak orang membuka literatur ilmiah sendiri dan tidak selalu berpikir biner, bahwa tulisan populer itu ringan dan tulisan ilmiah itu berat, diantaranya hanyalah ketiadaan.

Dalam jawaban-jawaban ini, subyektivitas saya sebagai seorang lelaki, berorientasi heteroseksual, umat Kristus dalam tradisi Ortodoksi Timur namun mengecap sejumlah pengalaman Protestan, orang yang sedikit belajar filsafat, berusia muda, berasal dari etnis Batak Toba namun dibesarkan dalam lingkungan Melayu dan Jawa dan pernah tinggal di Jatinangor, Bandung, Surakarta, dll serta sejumlah *social-unconsciousness* yang mungkin, tentu akan sangat berpengaruh.

Bahkan dalam menata jawaban-jawaban itu, saya pun semakin mencoba membuat ajeg setiap identitas dan pengalaman yang masih saya lekat. Saya tidak berusaha untuk menjadi wakil umat Kristiani yang fasih menjelaskan sikap-jelas terhadap homoseksualitas (Dalam tradisi gereja yang kami anut, penjelasan komprehensif seperti itu utamanya ada pada para klergi, juga dapat ditemui dalam banyak tulisan dan ketetapan para Bapa Gereja). Saya hanya berusaha memetakan masalah dan menilai sejumlah alternatif yang mungkin dalam dialog. Dengan melakukan demikian saya pun tengah berupaya memetakan dan

membuat ajeg segala identitas yang melekat pada diri saya sendiri untuk bersikap pada isu ini. Mungkin masih banyak sekali kekurangan, namun dengan menuliskannya saya bisa dicelikkan untuk melihatnya. Sehingga pembelajaran adalah hal yang maju.

## *Pemetaan Masalah*

Keributan dan ketidaknyambungan diskusi terkait perkawinan sejenis dan isu homoseksual – khusus dalam dialognya dengan iman Kristiani – seringkali terjadi karena reduksi berlebihan dan kerancuan pemaknaan istilah serta pencampuran isu. Saya mencatat untuk dialog ini setidaknya ada empat penghalang yang harus dijembatani agar dialog lebih terduduk pada tempat yang pantas. Pertama konsep homoseksualitas itu sendiri cukup beragam, namun sering dipukul rata. Lalu kebanyakan masyarakat kita juga belum terlalu membedakan konsep gender vs sex dan cenderung biner dalam menyebut keduanya (hal yang kontras dengan kebanyakan ilmuwan sosial). Kemudian, terkait terhadap pemaknaan ayat-ayat suci dalam tradisi Yudeo-Kristiani yang dianggap menentang homoseksualitas. Masalah terakhir adalah soal boleh atau perlunya negara demokrasi (dengan sikap religius yang kental atau tidak) menelurkan aturan yang melegalkan perkawinan sejenis.

### 1. Penelurusan konsep homoseksualitas

Kita mulai menjejak yang pertama. Homoseksualitas itu sendiri punya sejarah panjang dalam kehidupan manusia. Perjalanan konsepnya sampai menjadi seperti sekarang tentu terbilang kompleks. Dalam diskursus kali ini setidaknya dibedakan tiga konsep terkait homoseksualitas: yang pertama **homoseksualitas terkait orientasi-erotis seseorang**, yang kedua **homoseksualitas terkait perilaku seksual yang homo-seks** dan yang ketiga **homoseksualitas sebagai identitas gender yang terpisah dan terbebas dari konsep biner**, baik secara individual maupun sebagai gerakan sosial.

Berkaca dari sejarah, konsep homoseksualitas yang pertama (orientasi erotis) dan yang kedua (perilaku seksual) sudah ada sejak *baheula*. Homo-erotisme dalam bentuk paling halus seperti pujian laki-laki atas ketampanan laki-laki lain, kedekatan persahabatan sesama jenis-kelamin, sehingga menimbulkan sentuhan tubuh yang terbilang intim, adalah tradisi yang lazim di sejumlah bangsa. Adab Timur-Tengah dimana pria dewasa saling mencium dan berpeluk mesra, kebiasaan perempuan dewasa Asia jalan bergandeng tangan, tidur seranjang berpelukan, dan sejumlah keintiman lain yang mungkin aneh bagi perspektif Eropa Modern adalah hal yang sudah membudaya sejak dulu. Bahkan jika meninjau sejarah kaum Yunani-Romawi klasik, perilaku seks homoseksual untuk pelesir adalah hal yang banyak tercatat. Baik di kalangan bangsawan, budak dan gladiator Romawi, maupun di sejumlah prajurit Sparta yang biasanya mementor prajurit sejak masa kecilnya.

Kitab Suci Yudeo-Kristiani mengkonfirmasi orientasi dan terutama praktik yang demikian. Kisah tentang pria-pria di Sodom-Gomora (Kejadian 19) dan Gibeon (Hakim-hakim 19), yang ingin ‘memakai’ pria asing (Ibrani: *waneda*, ‘kami memakai/berhubungan/mengenal mereka’) – terlepas apakah semata karena orientasi seksual atau juga karena menekankan unsur dominasi – adalah contoh yang bisa diajukan.

Demikian pula di era perjanjian baru saat Rasul Paulus menyoroti kehidupan masyarakat Roma (Roma 1:18-32).

Harus diakui, narasi tradisional tadi memang kebanyakan menceritakan homoseksualitas lelaki dengan lelaki. Terutama sekali karena tradisi literasi umumnya patriarkhis. Namun tetap saja ada sejumlah narasi perempuan berhubungan seksual dengan perempuan lain. Yang paling banyak dirujuk tentu Hukum Hammurabi ( $\pm$  1700 SM), yang menyebut '*salzikrum*,' perempuan yang oleh sejumlah ahli filologi ditafsirkan sebagai perempuan yang bisa menikahi perempuan lain. Contoh lain dapat ditemui dalam kisah yang ditulis penyair Yunani Sappho ( $\pm$  600 SM) dan penyair Romawi Ovidius ( $\pm$  40 SM) yang dipercaya mencerminkan keadaan zamannya. Teguran Rasul Paulus di Roma 1:26 juga kemungkinan diarahkan pada hubungan seksual perempuan yang sudah menikah dengan perempuan lain.

Meski demikian umumnya lelaki maupun perempuan yang melakoni homo-erotisme dan bahkan hubungan seks homoseksual di banyak catatan sejarah tadi, tidak memisah membentuk definisi gender tersendiri. Kebanyakan mereka yang mempraktikkan seksualitas homoseks dalam istilah orientasi sekarang mungkin lebih cocok disebut 'bi-seksual', atau lebih halus lagi 'bi-erotisme' karena pada kenyataannya mereka toh tetap berkeluarga secara hetero-seksual dan memiliki keturunan dari hubungan hetero tersebut.

Sejumlah tradisi memang mencatat, orang-orang yang akhirnya tidak membentuk 'keluarga hetero'. Mereka itu kalau bukan menjadi seorang yang terus-menerus jadi pelaku homo-seksual, bisa juga menjadi seorang transgender, inter-sex atau aseksual yang tidak lagi mengejar hubungan seksual. Semua tipe ini sering jadi bagian dari ritus-ibadah agama kuno. Tipe pertama (homo-seksualitas terus-menerus) lebih banyak muncul di tradisi Mediterania dan Asia Barat (dicatat sebagai 'pelacur bakti' dalam Perjanjian Baru, yang posisi teologisnya mirip dengan pelaku seks hetero-seksual yang juga ada dalam ritus ibadah). Sementara tipe kedua (transgender, inter-sex atau aseksual) banyak dijumpai di sejumlah tradisi-kecil keagamaan Asia-Selatan atau yang terpengaruh olehnya. Mereka ini menjadi pengamal estetika paradoks, karena dianggap bukan laki-laki dan bukan perempuan namun juga laki-laki sekaligus perempuan, sehingga punya dimensi spiritual tersendiri. Namun tetap saja keberadaan mereka itu terdefinisi karena konsep gender yang biner. Mereka itu lah 'ya dan tidaknya' laki-laki sekaligus 'ya dan tidaknya' perempuan.

Berkaca dari teori psiko-analisis Freud, maupun Jung yang lebih kalem, hal ini bisa dibaca sebagai perkembangan psikologis seseorang. Tiap orang punya kecenderungan untuk jadi homo-erotis maupun hetero-erotis. Ada *anima* untuk tiap *shadow* lelaki dan ada *animus* untuk tiap *shadow* perempuan. Apakah itu akhirnya mewujudkan menjadi tindakan dan perilaku yang homoseks itu tentu tergantung banyak hal yang mempengaruhi si individu. Spektrum utama pembacaan ini masih biner dan masih tetap mengacu pada *sex* (jenis kelamin dalam perspektif biologis) sebagai panduan.

Konsep homoseksualitas yang ketiga, memang masih terbilang baru. Di Eropa gerakan ini menyusul gerakan kesetaraan gender yang diusung kaum feminis, juga memberikan pijakan untuk gerakan berikutnya yang berlandas konsep Gender-Queer. Adalah Filsuf Perancis Michel Foucault yang terang-terangan menunjukkan dukungan tindakan dan argumen untuk penegasan identitas kaum homoseks. Foucault membuktikan bahwa pengetahuan lekat urusannya dengan kekuasaan, maka tak ada yang tabu untuk dilabrak, termasuk terkait definisi seks yang hetero-seksual yang selama ini mengekang segala kemungkinan homo-seksual. Psiko-analisis Lacan memberi pijakan yang lebih mendalam saat menunjukkan gender adalah identitas sosial yang terbentuk karena bahasa, karena *deadlock* yang dialami saat melewati

fase *le real*. Maka kita selalu bisa memberi definisi gender lain selain lelaki dan perempuan. Ada banyak kemungkinan lain yang masih bisa dieksplorasi, yang kemudian akan membatasi kita lagi dalam menghampiri kenyataan lewat bahasa, namun setidaknya lebih kaya dari batasan sebelumnya.

Pemahaman seperti Lacan tadi yang akhirnya memicu bahasa kita menambah kategori lain selain kategori homoseks biner: **lesbian** dan **gay**, dan turunan yang masih agak biner **biseksual** (berorientasi baik pada lelaki dan perempuan) dan **interseks** (untuk yang belum memutuskan atau merasa diantara lelaki dan perempuan) menjadi **transgender** (untuk yang berganti atau setengah berganti dari perempuan ke lelaki atau sebaliknya atau malah untuk penerobosan isu gender melampaui sex). Bahkan selanjutnya di Eropa munculah kampanye **queer**, demi menampung segala kategori lain seperti **demi-seksual** (berorientasi seksual pada orang yang dekat dan intim dengannya tanpa pandang gender), **pan-seksual** (berorientasi seksual pada semua kategori yang mungkin, tidak hanya lelaki dan perempuan), **a-seksual**, **auto-seksual**, dan barangkali banyak kemungkinan lain lagi.

Kompleks bukan? Kembali ke topik kita soal homoseksualitas, kita harus mengakui konsep pertama (orientasi), kedua (perilaku) maupun ketiga (identitas non biner) tidak bisa disamaratakan begitu saja. Seorang yang memiliki ketertarikan pada individu yang sejenis kelamin, belum tentu mempraktikkan orientasinya tersebut dalam perilaku seksual, seorang yang telah mempraktikkan perilaku seksual yang homoseks belum tentu langsung menganut identitas gender yang non-biner seperti kesadaran post-modern dan post-feminis. Maka segala jawaban yang memukul-rata atau mereduksi semuanya adalah celah untuk kefanatikan dan sikap naif. Baik dari kalangan religius yang mengira semua konsep tersebut sama, maupun kalangan LGBITQ yang mengira semua orientasi dan praktik seksual yang homoseks itu dilandasi oleh kesadaran identitas gender yang non-biner.

## 2. Bineritas dan Sex vs Gender

**K**endala bahasa dalam membedakan konsep biologis ‘sex’ (Indonesia senada dengan ‘jenis kelamin’) dan konsep psiko-sosial ‘gender’ (terkait semua atribut dan predikat sosial yang melekat pada gender tertentu) itu juga menjadi ganjalan lain saat diskusi. Keduanya sering dianggap sama. Ya, baik jenis kelamin dan gender cuma ada ‘laki-laki’ dan ‘perempuan’. Pemahaman non-distingtif dan biner seperti itu cenderung muncul di tradisi berbahasa di Nusantara. Juga dalam tradisi berbahasa kalangan religius.

Ini berbeda dengan tradisi berbahasa intelektual sosial umumnya. Dalam perbahasaan termutakhir *sex* boleh hanya ‘male’ dan ‘female’, tapi gender tak selalu harus ‘man’ and ‘woman’. Karena ini ada kaitannya dengan konstruk sosial sebagaimana diteorikan oleh sejumlah filsuf feminis dan postmo. Pembedaan seperti ini meski tetap menuai kritik, juga belum beroleh kata sepakat soal pemaknaan gender non-biner, namun sudah menjadi trend di ilmu sosial era post-modern.

Maka menjembatani dialog dengan dua asumsi tadi adalah tugas yang tidak mudah. Kaum pro pada *pembedaan gender vs sex* tentu akan menganggap pemahaman tradisional yang tidak membedakan keduanya sebagai kaum dengan konsepsi kolot dan lebih miskin pemaknaan. Sementara kaum yang kontra pada pembedaan tersebut akan menganggap konsep gender yang berbeda dengan ‘sex’ itu sebagai penyelewengan provokatif.

Lebih pelik lagi, kombinasinya tentu bukan cuma dua kubu di atas, tapi ada dua kubu lain, yang turut memperkeruh. Pertama kaum yang *pro pada pembedaan gender vs sex*, namun tak setuju pada konsep gender yang non-biner (seperti pada kalangan aktivis feminis klasik). Juga ada kaum yang setuju konsep gender non-biner, namun tak mau tahu soal pembedaan gender vs sex (seperti pada kalangan LGBTIQ yang tak terlalu peduli pada kajian akademis). Rumit kan?

Tapi bukan maksud saya membuat semakin pesimis akan kesepakatan asumsi. Jujur saja, permasalahannya bukan cuma sekedar beralih konsep. Namun melibatkan penggunaan bahasa dan monopoli makna.

Perbahasan itu memang masalah rumit. Sistem ini merasuk bahkan ke sisi tak sadar dan keseharian manusia. Bahasa Indonesia misalnya, tidak terbiasa dengan distingsi dan cenderung biner. Sehingga sekalipun ada seorang Indonesia yang pro-LGBTIQ tulen, sangat setuju dengan distingsi gender vs sex, atau bahkan menjadi pengikut garis keras Foucault, ia akan tetap kesulitan mengkomunikasikan idenya dengan bahasa Indonesia saat ini.

Betapa tidak, hampir semua sapaan kita pada orang lain umumnya tidak membedakan antara gender dan sex serta cenderung biner. Saat bertemu orang yang lebih tua kita akan memanggil orang tersebut dengan: Kakek/Nenek, Opa/Oma, Bapak/Ibu, Om/Tante, Abang/Kakak (Melayu-Medan), Koko/Cici (Tionghoa), Mas/Mbak (Jawa), Akang/Teteh (Sunda) Kaka/Kakak (Melayu-Papua), dst. Hanya ada sedikit panggilan yang lintas gender dan terbilang unisex untuk orang yang lebih tua, yaitu: Kakak (dalam pemaknaan Bahasa Indonesia Baku) dan Mbah/Eyang (dalam pemaknaan Jawa). Untuk sapaan pada yang lebih muda kita memang punya term yang unisex seperti adik, Nak, dan Cu, meski demikian sapaan yang biner tetap lebih banyak mewujud dalam panggilan seperti Ujang/Neng, Geulis/Kasep, Ucok/Butet, Buyung/Upik, dll. Sementara untuk yang sebaya kita juga agak kelabakan mencari yang pantas untuk kasus individual.

Praktisnya begini. Saat Anda baru bertemu dengan seorang yang dari tampilannya kelihatan transgender (dan ia memang mengakui demikian) sapaan apa yang Anda akan layangkan padanya? Kalaupun Anda memilih salah satu dari sapaan yang pantas: Kakak, Cin, Sob, Ce-es, dll. Sapaan itu tidaklah otomatis dalam kendali berbahasa orang Indonesia pada umumnya. Sapaan lazim orang Indonesia pasti akan cenderung biner: kalau bukan Mas ya Mbak, Pace ya Mace, saudara ya saudari dll. *Tet-tot!*

Lalu apa solusinya biar dialog terkait tema ini bisa maju? Idealnya ya semuanya sama-sama saling belajar memahami bahasa masing-masing dan mencoba memakai kaca-mata kubu lain. Tapi apa iya semua pihak mau berbuat begitu? Kalau melihat perdebatan di lini-masa sih, kita cuma bisa senyum mesem menjawab pertanyaan ini.

### **3. Keberatan Kristiani terhadap homoseksualitas dan perkawinan sejenis**

**B**erikutnya mari kita mulai petakan sikap kalangan Kristiani terhadap isu homoseksualitas dan pernikahan sejenis. Banyak kalangan (umumnya tradisi Protestan yang literalis dan Sola Scripturis) langsung memamer sejumlah ayat-ayat dalam menentang homoseksualitas. Kebanyakan merekapun

tidak mau mencoba menelaah pemaknaan *gender vs sex* dan pukul rata sama semua konsep homoseksualitas. Posisi ini mungkin baik dalam mempertahankan kemurnian ajaran, namun sering kali sekedar pelarian dari diskusi dan menjadikan dialog sulit mencapai sisi membangun, sebab wajah Kekristenan yang dipajang adalah wajah keras dan tak mau belajar. Sayangnya di sisi lain kaum liberal Kristiani, yang sering juga memberi tafsir *Sola Scripturis*, justru memamer toleransi berlebih yang akan selalu berubah pijakannya.

Sekedar memberi contoh pertentangan kedua jenis tafsir tersebut, berikut diangkat sejumlah ayat dari Kitab Suci yang selama ini sering diangkat terkait kontroversi isu homoseksual.

#### **a. Penciptaan (Kejadian 2)**

*"It's Adam and Eve, not Adam and Steve,"* adalah pamungkas diskusi yang sering diusung kaum Kristen fundamentalis di Amerika saat berkampanye anti homoseksualitas. Bagi mereka rancangan Allah sejak awal adalah pernikahan hetero-seksual dan monogami. Segala bentuk lain (semisal poligami atau homoseksual) adalah penyimpangan dari kehendak dan rencana Allah. Meme ini mungkin jadi senjata yang lumayan ampuh. Sayangnya menutup dialog.

Kaum liberal umumnya berpendapat bahwa adalah tafsiran yang konyol jika Tuhan hanya menciptakan dua orang sebagai manusia pertama. Tuhan menciptakan banyak manusia (Ibrani: *adam*). Orang mana yang dianggap menjadi halangan untuk Kain saat dia dibuang? Darimana asalnya istri Kain dan keturunannya, jika mereka awalnya tidak bercampur dengan keturunan Set? Kaum liberal meyakini bahwa diantara sekian banyak manusia ciptaan Tuhan selain Adam dan Hawa, ada banyak manusia lain, yang mungkin saja ada yang berorientasi non-heteroseksual. *Tselem* dan *demuth* Allah (Ibrani, sering terjemahkan sebagai 'gambar dan rupa' atau 'peta dan teladan') bagi mereka tentu saja bisa diwujudkan dalam orientasi gender (bukan sex) yang non-hetero.

Tafsir yang lebih berani dari pihak yang pro perilaku auto-seksual bahkan menyebut sebelum Tuhan 'membedah' Adam dan menciptakan Hawa dari rusuknya, manusia pada hakikatnya bisa adalah makhluk auto-seksual.

Ada lagi yang dengan tajam mengajukan kritik filosofis: kenapa yang ditekankan melulu soal dua jenis kelaminnya? Kenapa soal jumlah dua orangnya juga tidak ditekankan? Padahal itu juga rancangan Allah. Jadi kalau Abraham, Yakub, Daud, Salomo, Nabi Hosea dan banyak orang lain yang berpoligami bisa dianggap kudus, padahal poligami bukan ketetapan awal Tuhan tentang pernikahan, mengapa Adam & Steve modern tidak bisa juga dianggap kudus, meski homoseksual bukan ketetapan awal Tuhan tentang pernikahan? Walau terdengar provokatif, namun pertanyaan ini benar-benar menghujam silogisme kaum fundamentalis Kristiani.

#### **b. Peristiwa Sodom dan Gomora (Kejadian 19)**

Argumen yang sering muncul di kalangan Kristiani serta-merta mengaitkan hukuman Tuhan atas Kota Sodom-Gomora dengan perilaku homoseksual para penduduknya. Kecenderungan penduduk kota itu melakukan hubungan homo-seksual tercermin dari tuntutan mereka pada Lot, saat keponakan Abraham itu menerima tamu yang sebenarnya adalah malaikat (ayat 5).

Namun penafsir liberal cenderung menafsirkan yang menjadikan Tuhan murka bukanlah perilaku sodomi-homoseksual, namun kejahatan dan ketidak-adilan kota itu pada orang asing. Orang asing, dan secara umum kaum yang lebih lemah, seharusnya tidak boleh ditindas.

Beberapa penafsir bahkan memakai argumen Talmudik untuk menyebut tindakan penduduk Sodom-Gomora pada tamu Lot adalah bentuk penolakan pada 'utusan Tuhan'.

Jika kita jujur membaca ayat Alkitab, yang menjadi alasan pembinasan Tuhan atas kedua kota metropolis purba itu memang tidak secara langsung terkait homo-seksualitas. Bahkan kesannya lebih dekat pada tafsir soal ketidak-adilan atau penindasan pada orang lemah.

Saat 'tawar-menawar' dengan Abraham di Kejadian 18, Tuhan menyatakan alasan pemusnahan Sodom-Gomora adalah "... *banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora dan sesungguhnya sangat berat dosanya...*(Kej 18:20)." Hal yang sama juga diulang oleh malaikat kepada Lot di Kejadian 19 [*karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan TUHAN*, 19:13].

Penafsir yang cenderung pro-homoseksualitas lantas membandingkan perilaku Kota Sodom-Gomora ini dengan perilaku manusia di zaman Nuh. Dimana perilaku homoseksual tidak dicatat, justru penekanannya pada perilaku hetero-seksual (Kejadian 6:2). Namun 'skala kerusakan' banjir Nuh – jika mau mengasumsikan demikian – ternyata lebih besar dari hukuman atas Sodom-Gomora.

**c. Peristiwa Gibeon (Hakim-hakim 19)**

Peristiwa di wilayah Suku Benyamin saat ada seorang pria Lewi singgah sementara di Kota Gibeon dan hampir diperkosa oleh lelaki kota itu adalah contoh senada dengan kasus Sodom-Gomora di atas. Bedanya luputnya si pria dari sodomi-homoseksual bukan karena 'mujizat ilahi', tapi karena ia menyerahkan gundiknya sebagai ganti dirinya. Dalam kisah ini dicatat umat Israel lain marah pada Suku Benyamin di Gibeon dan Tuhan merestui niat mereka menghukum kaum Benyamin.

Penafsir yang cenderung anti-homoseksualitas menganggap restu Tuhan tadi sebagai restu atas perjuangan melawan homo-seksualitas. Sementara yang pro-homoseksualitas umumnya berpendapat bahwa yang salah bukan sekedar ancaman sodomi-homoseks pria-pria Kota Gibeon pada orang Lewi tersebut. Namun penindasan yang mereka lakukan, terutama pada saudara sendiri.

**d. Larangan Tidur dengan Lelaki seperti Perempuan (Imamat 18 dan 20)**

Berbeda dengan tiga hal di atas yang berbentuk kisah dan cenderung multitafsir, dua ayat di Kitab Imamat ini berkata jelas bahwa: *perbuatan lelaki tidur-bersetubuh dengan lelaki lain seperti ia berhubungan dengan perempuan adalah satu bentuk kekejian* [Imamat 18:23 & 20:13]. Bagi penafsir yang anti-homoseksualitas ayat ini sudah memberikan landasan jelas.



Namun para penafsir yang cenderung liberal akan berargumen bahwa inti utama pesan larangan di kedua perikop tersebut adalah agar umat Israel tidak mengikuti perilaku bangsa-bangsa lain dan menegaskan eksklusivitasnya sebagai bangsa pilihan Tuhan.

Pun, perilaku seksual homoseks itu juga dilakukan di luar pernikahan yang sah. Penegasan ini hanyalah bentuk perincian akan kemungkinan-kemungkinan perilaku seksual di luar pernikahan yang sah. Jadi pengutukan atas hal ini senada dengan pengutukan atas incest, sodomi pada binatang, perselingkuhan, dan banyak hal lain.

Kaum Kristen *neo-testamental* yang pro pada LGBTIQ juga berargumen bahwa perintah tersebut hanya tercantum jelas di Taurat, tidak dalam kaca-mata kasih Kristiani. Sehingga tidak boleh serta-merta diterapkan pada kekristenan. Sama seperti Orang Kristen juga tidak menerapkan sejumlah perintah dan larangan di bagian Taurat lain (Sabbat, sunat, larangan menikah dengan bangsa lain, larangan makanan haram, kewajiban perpuluhan, kewajiban pernikahan levirat dll).

**e. Teguran Rasul Paulus pada Jemaat Roma (Roma 1: 24-32)**

Meski juga secara eksplisit bicara soal tentangan atas perilaku homoseksual (antar sesama lelaki dan sangat mungkin juga antar sesama perempuan), ayat ini tidak serta-merta jadi kemenangan penafsir anti-homoseksualitas dalam diskusi Sola-Scripturis. Bagi kaum yang lebih liberal teguran ini dimengerti sebagai teguran yang ditujukan pada perilaku penduduk Roma yang sering haus variasi hubungan seks selain hubungan suami-istri yang rutin. Sejarah memang mencatat banyak perilaku demikian terjadi pada kaum merdeka dan warga negara Roma. Jadi sekali lagi perdebatannya apakah yang ditentang perilaku homo-seksualitasnya atau ketidak-kudusan orang dalam memelihara komitmen perkawinan.

**f. Peringatan pada banci dan pemburit sebagai salah satu bentuk perbuatan dosa (1 Korintus 6:9-11 dan 1 Timotius 1:10).**

Makna istilah *banci* dan *pemburit* dalam ayat ini memang menjadi perdebatan panjang para pakar biblia. Dalam Bahasa Yunani-Koine, kata *banci*, *malakos*, sejatinya bisa dipakai untuk arti 'lembut' pada pakaian mahal (lihat misalnya perkataan Yesus di Matius 11:8 dan Lukas 7:25). Atau juga bisa berkonotasi 'lemah' dan 'gemulai'. Sementara kata *pemburit*, *arsenokoitai*, diyakini terbentuk dari dua kata *arren/arsen* (jantan/lelaki) dan *koiten* (ranjang, dalam konotasi seksual).

Sebagian penafsir mengartikan *malakos* dan *arsenokotai* sebagai lelaki yang berhubungan dengan lelaki lain. Dimana *malakos* yang lebih pasif dan *arsenokoitai* yang lebih agresif. Sementara penafsir lain menganggap keduanya bukan pasangan homoseksual biasa (dalam pengertian suka sama suka), tapi orang-orang yang memang menjalani profesi khusus dalam eksploitasi seksualitas, sama seperti pelacur pada umumnya. Hanya saja mereka lelaki dan sering bersedia meladeni praktik seksual homoseks komersial. Ini merupakan fenomena yang cukup sering terjadi di kota-kota metropolis Romawi pada zaman Perjanjian Baru. Jadi menurut para penafsir ini Rasul Paulus hanya mendaftarkan saja perilaku-perilaku seksualitas yang salah, tidak

membedakan derajat satu dengan yang lain (sebab di 1 Timotius 1:10 kata *banci* juga tidak dicantumkan dalam parafrase peringatan yang terbilang sangat senada).

Jadi tentu saja yang diperdebatkan lagi-lagi apakah yang disalahkan praktik homoseksualnya atau perilaku komersialisasi seksual yang sudah pasti dilakukan di luar komitmen perkawinan.

Sebagian penafsir juga berpendapat bahwa mereka adalah orang-orang yang memang dipakai untuk ritual keagamaan tertentu yang melibatkan praktik seksual sehingga keberatan Rasul Paulus nampaknya karena perilaku tersebut lekat dengan penyembahan berhala.

Sebagai tambahan, beberapa penafsir yang cenderung liberal bahkan beranggapan kecenderungan kedekatan sesama jenis kelamin antara Daud-Yonatan, Ruth dan Naomi serta beberapa orang kudus dalam tradisi gereja sebagai hal yang mencerminkan homoerotisme, sama seperti tafsiran mereka akan banyak kisah persahabatan dan kedekatan senada di Timur dan Eropa kuno. Hal yang wajar mengingat mereka melihatnya dari kacamata Eropa modern yang agak jarang melihat kedekatan yang demikian.

**T**erlihat betapa sulitnya berargumentasi jika landasannya sekedar memandang legalis ayat-ayat di Kitab Suci. Tafsir yang demikian seringkali sangat individual dan sudah sangat lekat dengan asumsi dasar yang ingin diambil oleh si penafsir. Ayat-ayat yang sama bisa ditafsir dengan kesimpulan yang sangat jauh bertentangan, sementara masing-masing kesimpulan mengklaim diri sebagai satu-satunya kebenaran. Lagipula semua tafsir tadi umumnya hanya berurusan di masalah perilaku seksual yang homoseks, tidak terlalu banyak membahas soal orientasi dan identitas seksual yang non-biner. Namun seringkali ayat-ayat yang kelihatannya 'keras' pada perilaku homoseks tadi dipukul rata untuk menjawab konsepsi homoseksualitas mana saja.

Hal-hal seperti tadi membuat saya tidak pernah lagi *saklek* memegang Sola Scriptura dalam bersikap, meski saya mengakui Alkitab adalah Firman Allah. Dalam Gereja Ortodoks, yang mengklaim diri sebagai gereja yang mempertahankan tradisi rasuli, landasan bersikap adalah ketetapan tubuh Kristus (Gereja) yang dipercaya ada dalam penjagaan Roh Kudus. Jadi bukan tafsir individual atas Kitab Suci. Tafsir-tafsir dari tokoh-tokoh gereja tentu berpengaruh namun koridor penjagaan *social unconscious* dan *social conscious* tradisi gerejawi. Hal yang hampir senada juga terjadi dalam rumpun yang masih mengklaim Tradisi suksesi-rasuliyah (Assyiria Timur, Katolik Timur dan Katolik Roma).

Tradisi Gereja itu sendiri sudah cukup banyak berbicara mengenai orientasi homoseksual maupun perilaku homoseksual. Dalam berbagai tulisan bapa gereja juga dalam ketetapan-ketetapan uskup lokal telah disuarakan sikap yang jelas terkait permasalahan ini. Namun terhadap sistem sosial yang mengajukan identitas homoseksual sebagai identitas gender tersendiri yang non-biner, nampaknya baru dapat dilihat pada ketetapan gereja di abad kedua puluh mengingat fenomenom itu sendiri juga baru berwujud nyata sejak zaman modern.

Patut dicatat gereja tidak pernah menganggap tak terselamatkan atau menolak melayani **pribadi** yang berorientasi homoseksual. Juga bahkan untuk mereka yang telah melakukan praktik homoseksual. Beberapa orang kudus dalam tradisi gereja bahkan mempunyai latar belakang demikian. Para kudus ini

akhirnya bisa menjalani kehidupan asketis yang bebas dari hasrat seksual, sama seperti Bapa dan Ibu kudus lain yang latar orientasi seksualnya hetero.

Namun jelas sekali gereja menyatakan bahwa hasrat dan praktik seksual yang tidak pada tempatnya (baik hetero maupun homo) sebagai dosa. Sejak dalam pikiran maupun sampai dilakukan dalam praktik, itu semua adalah bentuk perzinahan. Satu-satunya tempat sah untuk melakukan seksualitas, murni sebagai anugerah Allah, adalah dalam tudung perlindungan sakramen perkawinan.

Tentu disini kaum pro-homoseksualitas akan beranggapan betapa tidak adilnya gereja. Jika untuk kaum yang berorientasi heteroseksual ada sarana 'pelampiasan' resmi berupa sakramen perkawinan, mengapa untuk kaum yang berorientasi homoseksual tidak?

Argumen Yudaistik dan Gereja Katolik Roma tentang prokreasi sering dijadikan jawaban atas hal ini. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk keturunan. Sehingga setiap bentuk hubungan seksual yang tidak diniatkan demikian tidak dapat disebut sebagai perkawinan. Atau setidaknya tidak akan direstui sebagai perkawinan.

Namun Gereja Ortodoks punya argumen lain. Terhadap keberatan itu gereja menjawab bahwa konsepsi perkawinan dalam iman Kristiani bukanlah semata – dan memang bukan untuk – pelampiasan hasrat seksual. Dalam pengertian umat Kristus perkawinan adalah cermin sederhana dari kasih Allah dalam Kemahakudusan Trinitas dan serta kesaksian akan kasih Kristus bagi jemaat. Keturunan adalah buah-bonus dari kasih itu, jadi bukan tujuan utama. Makna seperti ini hanya dapat dilakoni jika yang melakukannya adalah lelaki dan perempuan yang telah bertumbuh dalam kasih Kristus serta mempraktikkannya. Tanpa unsur yang demikian pada hakikatnya itu bukanlah pernikahan Kristiani dan menyalahi kodrat sakramental perkawinan Kristiani.

Maka keberatan di atas, di mata Gereja Ortodoks, adalah sama halnya dengan mempertanyakan komitmen gereja terhadap kesetaraan gender karena tidak membolehkan imam perempuan. Masalahnya bukanlah karena gereja tidak menghargai perempuan. Namun karena posisi imam punya makna simbolis-teologis yang khas (ikon Kristus yang hadir di dunia dalam wujud seorang pria, sosok Bapa bagi umat dan paling sentral pengemban Tubuh Kristus dalam ekaristi), yang jika diganti oleh perempuan akan kehilangan dan merusak makna simbol teologis itu sendiri. Dan dengan sendirinya kehilangan sebagian (atau malah seluruh) identitasnya sebagai Gereja Kritis yang Ortodoks.

Jadi bagi Gereja Ortodoks sakramen perkawinan itu memang akan kehilangan makna-teologis jika dilakoni oleh pasangan yang sejenis. Namun juga akan kehilangan makna-teologis jika dilakoni oleh suami-istri yang tidak menunjukkan kasih Kristus.

Di sinilah keutuhan **ortodoksi** (ajaran yang benar), **ortopraksi** (perilaku yang benar) yang dilandasi **ortolateria** (ibadah sakramental yang benar) menjadi jantung kekristenan yang Ortodoks. Maka sembari umat Ortodoks menyatakan ketidak-setujuannya atas praktik seks homoseksual dan ritual pernikahan sejenis karena menyalahi makna sakramental perkawinan, umat yang sama juga akan mengoreksi dirinya jauh lebih dalam soal praktik hidup pernikahan dan/atau seksualitasnya sendiri yang tidak sesuai dengan makna sakramental perkawinan. Setiap bentuk ketidaksesuaian tadi adalah *hamartia*, dosa dalam pemaknaan menyimpang dari ketetapan Tuhan. Semuanya tetap bisa diperbaiki asal mau terus-menerus dibentuk oleh Tuhan dan menghargai kesempatan pertobatan yang diberikan Tuhan.

Secara filosofis setiap umat Kristiani memang menanggung beban yang berat untuk bisa menguasai diri terkait hasrat seksualnya. 'Standar' yang dituntut Sang Juru Selamat mengenai kekudusan seksual memang terbilang tinggi sekali, kecabulan sejak dalam pikiran pun itu sudah dinyatakan sebagai zina. Maka dari itu, kerinduan akan *theosis* (pengilahan) semestinya dimaknai sebagai proses yang terus-menerus dalam jatuh-bangunnya. Semestinya tidak melulu disorot dalam kaca-mata yuridis 'salah-benar', namun dalam kacamata kesembuhan spiritual 'pulih-belum pulih'.

Dalam proses tersebut saudara-saudari yang berlatar homoseksual mungkin akan menghadapi tantangan yang lebih berat. Mereka harus merelakan diri untuk menjaga kesucian seksualitas dalam koridor yang nyaris sama dengan saudara-saudari yang mengkaukan diri melajang, menjadi biarawan-biarawati. Walaupun tidak demikian jadi terkesan harus merubah orientasinya (yang sebenarnya juga mungkin). Belum lagi tantangan dari lingkungan dan orang-orang yang mencemoohkan seperti lazim di masyarakat kita. Maka adalah tugas gereja untuk mendampingi dan terus mengasihi, meski terus menegur kesalahan.

**U**raian yang disampaikan sejauh ini baru pada orientasi dan perilaku homoseksual. Hal yang memang sudah dihadapi gereja sejak awal berdirinya. Permasalahan yang lebih pelik di masa sekarang adalah bagaimana gereja memandang perkembangan, saat homoseksualitas jadi identitas gender tersendiri. Mereka yang bersepakat secara sosial untuk memiliki pandangan yang berbeda dengan gereja terkait definisi gender dan seksualitas.

Mengajukan pertanyaan ini adalah analog dengan pertanyaan bagaimana gereja memandang, misalnya atheisme, sekumpulan orang yang mengikrarkan diri untuk memiliki pandangan yang berbeda dengan gereja terkait definisi dan keberadaan Tuhan.

Atau dalam konsepsi yang lebih samar lagi, bagaimana gereja memandang orang-orang yang percaya pada reinkarnasi, yaitu mereka yang memilih pandangan yang berbeda dengan gereja terkait jiwa manusia dan kekekalan.

Di sinilah letak kompleksitasnya. Gereja sudah punya posisi yang jelas jika pandangan yang berbeda itu dinyatakan dalam bentuk ekspresi keagamaan lain. Gereja memang berbeda dengan penganut Agama Yahudi, Islam, Buddha, Hindu, Baha'i dan lain sebagainya, meski sangat mungkin ada beberapa ajaran moral yang bersesuaian atau ritual yang mirip. Kecil kemungkinannya penganut salah satu agama seperti itu juga menjadi jemaat gereja. Namun bagaimana dengan atheisme, identitas homoseksual dan kepercayaan tertentu yang sangat mungkin dianut sementara orang tersebut ikut menjadi jemaat gereja?

Di sinilah gereja perlu menegaskan ajaran, namun dengan penuh kasih dalam mengajar. Selayaknyalah sakramen hanya dilayankan pada mereka yang secara spritual ada dalam kesatuan dengan ajaran gereja. Simpatikan pengunjung gereja memang boleh menganut pandangan dasar yang berbeda, tapi tidak jika mereka telah mengikrarkan diri terhisab dalam gereja yang kudus. Tentu saja sangat mungkin ada ketidaksesuaian praktik dan pandangan pribadi dengan ajaran gereja karena kurangnya pemahaman, tapi saat pemahaman telah didabarkan tentu adalah kewajiban umat untuk menerima.

Dalam hal sikap terhadap orang berbeda-pandang namun ada (atau ikut kegiatan) dalam gereja seperti ini, gereja tidak boleh membeda-bedakan antara beda-pandang yang satu dengan beda-pandang yang lain. Jadi sikap terhadap orang yang punya tendensi ajaran atheisme, kepercayaan terhadap reinkarnasi, tidak meyakini sakramen ekaristi itu adalah benar-benar tubuh dan darah kristus, tidak mempercayai Trinitas yang Ortodoks, tidak mengakui suksesi rasuli – termasuk terhadap mereka yang mendefinisikan gender secara berbeda dengan definisi gereja – haruslah *fair*. Ketidakadilan dalam sikap karena kekurangan pemahaman anggota gereja mungkin masih bisa dimaklumi, tapi harus dikomitmenkan untuk terus diperbaiki.

Namun jika kelompok tersebut memang terang-terangan memang menyatakan diri ada di luar Gereja, maka Gereja tidak punya hak apapun selain berdialog dalam respek. Sama seperti respek yang ditunjukkan ke umat beragama lain, juga ke seluruh umat manusia. Sebab bicara mengenai nasib akhir manusia dan keselamatan itu adalah hak prerogatif Tuhan. Gereja hanya bisa meyakini dan mendabarkan kebenaran yang diterimanya sebagai wahyu, dan menyerahkan pada ketetapan Tuhan semua pilihan dan pandangan lain selain yang diwahyukan padanya.

Posisi ini memang lebih mudah untuk dilukiskan dengan kata, sebab dalam praktiknya tentu umat dan pemimpin gereja sering melakukan kesalahan, entah karena bersikap terlalu keras sehingga menimbulkan luka yang tidak perlu. Atau malah terlalu lunak dalam kompromi sehingga membingungkan banyak orang. Permasalahan yang tentunya sangat kasuistik dan tidak boleh sembarang dipukul rata.

Tapi yang jelas Gereja Ortodoks dalam pendabaran akan keyakinannya tidak akan sekedar mengolok-olok kaum berbeda pandang dengan berita bernada ancaman, seperti Tuhan akan murka pada dosa dan melaknat pendosanya. Sehingga narasi-narasi yang melulu berisi ancaman azab semisal hukuman Sodom-Gomora pada kaum homoseks, bukanlah narasi kampanye yang penuh kasih Kristiani.

Kaca mata legalistik memang sering berbeda kapasitas dan keluasan dengan kaca mata kasih. Sayangnya dalam tradisi beragama Abrahamik, pandangan legalistik bahwa Tuhan menghukum dosa dengan azab adalah narasi yang cenderung muncul. Yudaisme, Islam dan Kekristenan Barat sering tanpa sadar melakukan penekanan yang berlebihan pada narasi yang demikian. Hal yang wajar mengingat hampir semua tokoh-tokoh dalam tradisi tersebut berlatar pandangan yuridis.

Di Gereja Barat misalnya, mulai Ambrosius, Agustinus, Anselmus, Thomas Aquinas, hingga Yohanes Calvin kesemuanya sering kali memakai kacamata legal dalam menilai permasalahan dosa. Pokoknya dosa upahnya hukuman, maut. Adam dan Hawa diusir dari Eden itu hukuman karena dosa mereka. Musa tidak boleh masuk ke Kanaan itu karena dia melanggar perintah Tuhan. Ayub walaupun kelihatan saleh, dia memang bersalah sebelumnya, makanya dihukum dengan penderitaan. Bahkan ini pulalah yang menggagas konsep tentang dosa-asal yang diderita semua manusia dan dalam ekstrimisasi yang lebih jauh oleh Calvin yang memandang semua manusia sudah rusak-total. Sehingga Yesus dalam narasi Gereja Barat sekarang sering kali ditokohkan sebagai ‘tebusan’ untuk membayar murka Allah atas dosa manusia. Narasi tentang neraka pun sebegitu kejamnya, seolah Allah dikesankan ‘sadistik’ yang suka melihat siksaan atas manusia.

Gereja Timur tidak menyempitkan narasinya pada pandangan yuridis. Namun utamanya merangkul pandangan terapeutik. Memandang dosa juga dalam kacamata kasih sebagai keterpurukan dan derita sakit yang memerlukan pemulihan. Sehingga – sekedar membalas contoh di atas – tindakan Allah mengusir Adam dan Hawa dari Eden, bukanlah sekedar hukuman, tapi utamanya justru tindakan kasih. Agar

manusia tidak selamanya hidup dalam dosa (dengan memakan buah pohon kehidupan setelah mereka makan buah pohon pengetahuan akan yang baik dan yang jahat), namun beroleh bagian jalan keselamatan. Penangguhan Musa untuk masuk ke Kanaan adalah bentuk kasih agar Musa tidak menanggung beban yang tak dapat ditanggungnya, yaitu menjadi Mesias bagi bangsanya. Kedatangan Mesias sejati justru memampukan Musa masuk kedalam tanah perjanjian (yaitu saat peristiwa transfigurasi dimana Yesus berbicara dengan Musa dan Elia di depan ketiga murid-Nya). Penderitaan yang dialami oleh Ayub adalah bentuk perizinan kasih Tuhan agar Ayub mengecap pengenalan yang sejati akan Allah, bukan sekedar kata orang. Penebusan Kristus justru diartikan sebagai pembukaan jalan dan teladan agar manusia bisa ambil bagian dengan kodrat keilahian. Sementara simbolisasi derita neraka dan derita karena dosa adalah konsekuensi logis dari sikap manusia yang menjauhi Allah, bukan kegemaran Allah untuk menyiksa pendosa.

Dengan sikap seperti inilah Gereja justru diminta lebih simpatik pada mereka yang mengalami penderitaan.

Maka dari itu saat menyampaikan pandangannya di ruang publik, gereja bukan sekedar mengambil posisi sebagai jaksa yang menunjuk-nunjuk kesalahan, atau pengacara yang serba membela, apalagi malah jadi hakim dalam perkara. Masih banyak posisi yang mungkin, termasuk menjadi dokter yang menawarkan kesembuhan spiritual atas dosa. Guru yang menawarkan ajaran berguna. Tapi ya memang kadang dokter dan guru ada juga yang galak, juga sangat mungkin hakim dan jaksa menjadi lembut. ☺

#### ***4. Diskursus Ruang Publik Demokratis Tentang Pelegalan Pernikahan Sejenis***

Isu legalitas pernikahan sejenis sebenarnya menjadi masalah yang berbeda karena ini adalah isu politis dan hukum, bukan isu sosial, psikologis apalagi teologis dan biologis. Meski sebenarnya wajar saja dalam argumentasi politiknya orang mencomot dasar dari kajian-kajian selain hukum, tapi penyamarataan isu pelegalan pernikahan sejenis sebagai isu sosial dan teologis bisa dikatakan salah kaprah. Dalam ideal masyarakat demokrasi pelegalan atau pelarangan (atau pembatalan pelegalan dan pelarangan) dalam aturan bersama adalah sah-sah saja, sepanjang telah melalui diskursus yang setara di ruang publik. Meski bisa menoleh referensi pada keyakinan kelompok-kelompok dalam masyarakat yang plural, namun aturan bersama ada dalam kerangka pemahaman bersama. Semestinya tidak mencerminkan bahasa dan nilai satu kelompok saja, apalagi di masyarakat yang sudah sangat plural.

Maka dari itu menyamakan orang yang mendukung pelegalan pernikahan sejenis dengan orang yang menentang agama, atau lebih parah lagi menganggap semua pendukung itu memang berorientasi non-heteroseksual adalah sikap naif.

Pertama, tidak semua orang yang berorientasi homoseksual setuju pada pelegalan pernikahan sejenis. Di kalangan yang kental memegang eksistensialisme-atheistik dan kaum LGBTIQ yang menganut anarkisme-politik, pelegalan pernikahan sejenis justru bentuk kelemahan perjuangan. Artinya kaum homoseksual memilih untuk *cemen* mengalah pada defenisi negara tentang pernikahan demi mengurangi tekanan yang dihadapi, atau lebih parah lagi, demi mendapat santunan keluarga seperti keluarga hetero-seksual. Bagi

mereka ini betapa tidak *ubbermensch*-nya kaum homoseksual yang seharusnya bisa mengikuti definisi Foucault sebagai spesies baru manusia, justru memilih takluk lagi pada kekuasaan politis.

Kedua, tentu saja tidak semua orang yang pro pelegalan pernikahan sejenis itu berorientasi homoseksual sekaligus mengusung sikap berjarak dari agama. Sebab cukup banyak pejuang yang sangat religius dan tentunya berorientasi heteroseksual yang meyakini bahwa setiap orang harusnya punya hak asasi dan hak politis yang sama. Maka hak membentuk rumah tangga (yang merupakan turunan dari hak asasi) dan hak menyatakan identitas sosial (yang merupakan hak politis), perlu tetap dibela.

Terhadap diskursus demokrasi untuk aturan bersama seperti ini, semestinya umat Kristus, sebagai warga negara, terlibat aktif tanpa perlu memakai bahasa religius yang berlebihan. Ajaran gereja tentu saja bisa dijadikan inspirasi untuk usulan aturan bersama, namun harus diterjemahkan ke dalam bahasa yang bisa dipahami oleh seluruh elemen masyarakat. Tentu saja masyarakat non-Kristiani pun perlu juga belajar lebih memahami bahasa religius Kristiani tersebut dan membantu penerjemahannya.

Harus diakui untuk isu homoseksual, kaum Kristiani – terutama di Amerika Serikat – sudah kalah wacana dalam diskursus. Sebab sejak awal pergulatannya di zaman modern, isu yang diusung umat Kristen seringkali semata alasan keagamaan. Mereka seolah abai jika kajian biologi, psikologi, filsafat dan ilmu-ilmu sosial sudah menantang wacana yang mereka ajukan. Meski tetap terbuka untuk diperdebatkan, sejumlah bukti keilmuan memang saat ini dijadikan alasan menolak argumen agama. Bukti biologis bahwa banyak hewan yang memiliki kecenderungan homoseksual telah meredam argumen naturalistik. Kebijakan perkumpulan psikolog yang membuang homoseksualitas dari daftar penyimpangan seksual, telah menggugurkan argumen psikologis yang diusung umat religius. Lebih telak lagi kajian gender di ranah filsafat dan ilmu sosial, yang hampir tidak pernah dilirik sebagai wacana pertarungan ide oleh kaum Kristen fundamentalis, telah menjadi argumen paling tajam untuk menggugurkan wacana religius. Yang tersisa hanya tinggal argumen teologis dan argumen politis, maka begitu kekuatan politis melemah, wacana pelegalan pernikahan sejenis dan penerimaan terhadap homoseksualitas adalah keniscayaan jika kaum LGBTIQ menyuarkan tuntutan mereka dengan massivitas-politis.

Ini tentunya *pe-er* buat intelektual Kristiani, juga kalangan religius dari tradisi manapun yang tidak setuju pernikahan sejenis. Jika memang mau bertarung untuk menggugurkan wacana penerimaan akan homoseksualitas dan pernikahan sejenis, tentunya harus bertarung dalam wacana ide dan dalam bahasa yang dipahami bersama. Di sini yang berperan adalah diskursus politik dan hukum, dengan bantuan sejumlah referensi keilmuan dan juga keyakinan, bukan masalah moralitas-teologis.

Tapi pun jika tidak demikian. Dalam arti gereja (dan umat beragama) memang menyerahkan perkembangan ilmu pengetahuan dan diskursus aturan hukum pada mereka yang bergelut di bidangnya (terlepas religius atau tidak, umatnya atau bukan), gereja masih bisa tetap mempertahankan dan menyerukan kemurnian ajarannya. Terutama dalam praktik internalnya sendiri yang dilihat dan disaksikan oleh dunia. Kebebasan ini pun masih tetap terbuka sepenuhnya dalam masyarakat demokratis, sepanjang diperjuangkan pula dalam diskursus.

Tentu saja disini butuh dialog intens dengan tujuan kemaslahatan bersama. Meminjam ideal Habermas akan deliberasi demokrasi, kaum religius perlu menerjemahkan bahasa religius mereka ke dalam pemahaman bersama, pun kaum 'sekuler' perlu melakukan hal serupa. Kedua-dua pihak pun harus saling membantu dalam upaya penerjemahan itu.

## *Mengurai Harapan dalam Diskursus*

Secara khusus untuk keempat permasalahan yang diajukan di pemetaan masalah sebelumnya, kaum yang setuju dan yang tidak setuju akan isu homoseksualitas dan pelegalan pernikahan sejenis, bisa sama-sama saling membantu untuk:

1. Menjembatani penyamarataan versus pembedaan konsep homoseksualitas (orientasi, perilaku seksual maupun identitas gender non-biner). Rasanya demi kemajuan diskusi tak ada salahnya untuk tiap kelompok (baik yang setuju dan terutama yang tidak setuju) bisa berkolaborasi untuk membedakan konsep homoseksualitas ini. Gereja butuh untuk menekankan pembedaan ini pada umatnya agar sikap yang lebih adil dan jujur pada kenyataan bisa dikembangkan. Sementara kaum yang setuju pada isu homoseksualitas dan pelegalan pernikahan sejenis juga perlu mengkampanyekan pembedaan ini demi kemudahan isu yang satu tidak diruwetkan oleh isu lainnya.
2. Mencoba memahami bahasa masing-masing, antara yang membedakan gender dengan sex dengan yang tidak, juga antara yang biner vs non-biner. Tidak perlu menyamakan konsep terkait pembahasaan ini. Hanya saja dibutuhkan peserta dialog yang bisa bertukar kacamata untuk memahami bahasa pihak lain.
3. Mencoba sama-sama menyampaikan pada kaum sekuler pemahaman eksklusif gereja terkait makna perkawinan. Sehingga ketidaksetujuan akan pernikahan sejenis tidak serta-merta berarti kebencian yang kolot. Juga menggugah kaum religius yang cenderung literalis agar berpandangan lebih luas, tidak sekedar memaklukan aturan pada teks yang sebenarnya bisa multitafsir.
4. Mendudukan persoalan pada tempatnya. Isu pelegalan pernikahan sejenis adalah isu hukum dan politis yang selalu terbuka untuk diperdebatkan dalam masyarakat demokratis dengan argumen yang dapat diterima dalam pemahaman bersama. Pendukung pelegalan tidak melulu berarti berorientasi homoseksual dan jauh dari agama, pun yang tidak setuju pelegalan tidak melulu berarti homofobia.

Masyarakat Eropa Barat telah menjadi bukti bahwa meskipun sekularisme dan individualisme selalu diusahakan menjadi dominan, ternyata masyarakat tetap perlu digerakkan oleh alasan-alasan etis-perenial (termasuk alasan religius dan konsep primordial) untuk menopang demokrasi. Demokrasi individualistik pada hakikatnya terbukti hanyalah berupa *oxymoron*. Sehingga perusakan ikatan-ikatan tradisionalis (termasuk ikatan religius) justru melemahkan identitas demokrasi. Maka ikatan-ikatan tadi semestinya tidak dihilangkan, namun ditata dalam tempat yang sesuai dalam demokrasi deliberatif.

Maka perlu juga kiranya untuk mengusung harapan dan alternatif yang mungkin dalam diskursus seperti ini. Seringkali kaum yang 'sekuler' berharap terlalu berlebihan (kalau tidak disebut memaksakan) akan perubahan di gereja (juga di kaum religius secara umum). Sehingga setiap gerak gereja dalam mempertahankan tradisi selalu dianggap sebagai perlawanan kaum kolot, sementara setiap gerak



perubahan selalu dianggap sebagai langkah progresif. Akan halnya isu homoseksualitas dan pelegalan pernikahan sejenis, para pengusung yang setuju isu ini seringkali langsung menuduh yang tidak bersetuju (termasuk gereja) sebagai yang berpandangan sempit dan homofobia. Padahal tidak selalu demikian.

Hal yang sebaliknya pun terjadi. Warga gereja sering berekspektasi bahwa pendapatnya adalah universal. Bukan merupakan identitas.

Maka kita perlu meninjau batasan yang mungkin dan tidak mungkin sehingga bisa membuat diskursus ini menjalankan kemajuan.

### **1. *Harapan kaum sekuler:***

- Untuk pandangan Gereja Ortodoks sendiri (dan sejumlah tradisi Kekristenan lain), kaum 'sekuler' memang bisa mengharapkan pengertian dan pembelajaran umat gereja untuk bersikap lebih baik dan menerima keberadaan kaum homoseksual, atau mereka yang mendefinisikan identitas gender lain yang berbeda dengan ajaran gereja.
- Umat gereja juga bisa kalau diharapkan untuk memakai bahasa dan sikap yang lebih santun terhadap kaum berbeda identitas gender. Tidak menerapkan diskriminasi dan tidak boleh memperlakukan mereka dengan tidak setara.
- Kaum sekuler juga bisa berharap agar umat gereja bersikap lebih fair. Memperlakukan orang yang defenisi-gendernya berbeda sebagai: (a) *sesama manusia yang setara dan harus dikasihi*, (b) *orang yang tetap dapat dilayani*, dan (c) *orang yang saat ini tidak satu ajaran dengan gereja, terkait gender*, sama seperti kaum yang beda pandang dengan gereja dalam kasus-kasus lain. Gereja juga bisa diharapkan untuk meredam sikap homofobia (misalnya menganggap kaum homoseksual lebih berbahaya dan lebih bejat ketimbang orang yang punya beda-pandang lain dengan gereja).
- Bahkan kaum sekuler pun bisa mengharapkan agar gereja menjadi lembaga yang aktif mendampingi kaum LGBTIQ dari penindasan yang dilakukan oleh masyarakat yang anti pada mereka. Serta bersuara menentang penindasan yang demikian. Meski ini memang menuntut kedewasaan iman warga gereja, namun tindakan ini tetaplah tidak menyalahi, bahkan sesuai dengan keberpihakan Kristus pada yang tertindas.

- Namun kaum sekuler tidak bisa mengharapkan gereja mengubah pendirian untuk kemudian melakukan pemberkatan pernikahan sejenis, atau menyatakan bahwa hubungan homoseksual (yang sama seperti hubungan heteroseksual di luar sakramen perkawian) sebagai hal yang sah-sah saja dilakukan umatnya.

Harus diakui dalam keluasan spektrum Agama Kristen ada sejumlah batasan yang bahkan tidak tentu jika yang ditinjau adalah seluruh denominasinya. Gereja-gereja (terutama di kalangan Neo-Protestan) bahkan sudah ada yang dengan terang-terangan memberkati pernikahan sejenis, atau setidaknya secara tegas mendukung pelegalannya. Ini tentu memenuhi harapan kaum sekuler, namun tentu tidak mencerminkan keseluruhan kekristenan. Di mata Gereja Ortodoks sifat yang selalu fleksibel seperti itu justru menuntut penganutnya untuk terus-menerus melakukan redefenisi identitas.

- Pun dengan itu kaum sekuler semestinya tidak berharap gereja atau umatnya akan ikut serta dalam mengkampanyekan upaya pelegalan pernikahan sejenis oleh negara. Sama seperti gereja dan umatnya tidak akan mungkin mengkampanyekan aturan yang membolehkan atheisme. Kalaupun ada satu dua individu umat gereja yang melakukan kampanye demikian, hendaknya tidak diharap untuk semua umat. Atau beranggapan itu pasti sebagai suatu kemajuan atau mereka adalah individu yang pasti baik.
- Akan halnya jika aturan itu sudah jadi ketetapan negara, tentu saja ketaatan umat gereja pada negara adalah kewajiban, namun tidak berarti gereja menjadi pro-atheis atau pro-homoseksualitas. Yang jelas keberadaan kaum yang berbeda pandangan perlu tetap dihargai.

## **2. Harapan Gereja**

- Sebaliknya umat gereja pun bisa berharap agar umat lain tetap menghargai pendirian gereja dan tetap memberi kebebasan gereja menyatakan pendapat teologisnya dengan cara santun. Kebebasan yang demikian harus terus diupayakan. Karena kebebasan beragama tidak melulu berarti penghilangan sama sekali ekspresi keagamaan di ruang publik.
- Umat gereja pun bisa berharap agar perdebatan wacana intelektual tentang isu homoseksualitas dan pelegalan pernikahan sejenis tetap terbuka dan selalu siap didengarkan, asalkan pembahasannya ada dalam pemahaman bersama.
- Gereja pun dapat berharap agar umatnya dan kelompok lain baik yang sekuler maupun religius yang punya ketidaksetujuan sama terkait isu homoseksualitas dan pernikahan sejenis bisa menjalin kerjasama setara dalam perjuangan isu, sama seperti kerjasama yang dilakukan oleh kelompok yang pro isu ini.
- Namun umat gereja tidak bisa berharap agar semua orang sudah mengerti asumsinya. Atau melihat dalam kaca-mata pemahaman yang sama soal ketidaksetujuannya akan pelegalan pernikahan sejenis. Umat harus menerjemahkan argumennya ke dalam bahasa yang dipahami bersama.
- Umat gereja juga tidak boleh mengharapkan adanya aturan dalam masyarakat demokratis yang sengaja mendiskriminasi apalagi bertujuan menghilangkan satu kelompok, terutama bila kelompok tersebut mengalami penindasan.

Batasan-batasan seperti ini agaknya memetakan harapan yang wajar, serta menghindari perdebatan yang tidak perlu namun bisa terus memungkinkan dialog yang lebih maju, meski kebersetujuan bersama nampaknya masih sebuah utopia.

**K**iranya refleksi sederhana dan terbatas ini bisa membantu memetakan serta melihat alternatif yang mungkin dalam diskusi isu homoseksualitas dan pernikahan sejenis. Untuk konteks Indonesia isu pelegalan pernikahan sejenis mungkin belum begitu relevan. Namun masyarakat kita memang sudah

menghadapi keberadaan kaum homoseksual baik yang sifatnya modern maupun tradisional. Jadi sikap gereja sebagai bagian dari masyarakat, tentu perlu mempertimbangkan sejumlah pertimbangan yang diajukan dalam refleksi ini.

**Oleh: Aphrem Risdo Simangunsong**